

ABSTRAK

DPRD Provinsi DKI Jakarta khususnya fraksi PDIP dan PSI dengan kompak meminta pengusulan penggunaan hak interpelasi terkait penyelenggaraan Formula E. berbagai alasan diutarakan seperti tempat penyelenggaraan yang belum pasti, pembangunan sirkuit yang belum rampung saat waktu pelaksanaan sudah dekat, hingga masalah utama yaitu meminta transparansi anggaran. Sayangnya alasan-alasan tersebut tidak membuat pengusulan interpelasi menjadi berhasil terlaksana karena tujuh dari sembilan fraksi lainnya menolak adanya interpelasi di meja paripurna. Melihat polemik antara kedua fraksi kontra dengan ketujuh fraksi pro dapat dikatakan bahwa keduanya sama-sama alot dalam pengusulan hak interpelasi terkait Formula E. Hal ini terjadi karena masing-masing anggota DPRD sedang berperan sebagai wakil dari masyarakat yang diwakilinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut; (1) mengapa Fraksi PDIP dan PSI mengusulkan penggunaan Hak Interpelasi terkait Formula E?, dan (2) bagaimana peran dan fungsi representasi dari Fraksi PDIP dan PSI mengenai pengusulan hak interpelasi terkait Formula E?

Teori yang digunakan adalah teori representasi Hanna F. Pitkin. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, dimana teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, catatan lapangan, dan pengumpulan data dokumen. Nantinya sumber-sumber tersebut akan divalidasi sehingga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam bentuk kesimpulan.

Temuan dari penelitian ini adalah adanya kesesuaian dengan realita yang terjadi oleh kedua fraksi dalam konteks pengusulan hak interpelasi terkait Formula E, Fraksi PDIP dan PSI telah melakukan fungsinya sebagai wakil yang mewakili peran sebagai sosok yang mewakili aspirasi dan kepentingan pihak yang diwakilinya. Dalam penelitian ini peneliti melihat bahwa perjuangan kepentingan yang dimaksud tidak semata-mata mewakili masyarakat saja, namun juga tertampung kepentingan partai dan juga komisi didalamnya. Namun pada kasus Formula E, semua yang direpresentasikan saling berkaitan dan tidak bersinggungan. Hal tersebut juga mencerminkan wujud demokrasi yang berkembang di negara Indonesia.

Kata kunci: Representasi, Hak Interpelasi, Formula E

ABSTRACT

The DKI Jakarta Provincial DPRD, especially the PDIP and PSI factions, unitedly requested the proposal for use the interpellation right related to be the implementation of Formula E. Various reasons were stated such as uncertain location of the event, the unfinished construction of circuit when the implementation was near, to the main problem, namely asking for a budget. Unfortunately, these reasons did not make the interpellation proposal a success because seven of nine other faction rejected the interpellation at the plenary table. Looking at the polemic between the two contra factions and the seven pro faction, it can be said that both of them are equally tough in proposing interpellation right related to Formula E. It's happen because each DPRD member is acting as a representative of the community he represents. Based on this background, the writer makes the following questions; (1) why did the PDIP and PSI factions propose the use of the interpellation right related to Formula E?, and (2) what is the role and function of the representation of the pdip AND psi factions regarding the proposal for interpellation right related to Formula E?

This study used Theory of representation of Hanna F. Pitkin. By using qualitative methods and case study approaches, where the data collection techniques are interview, field noted, and document data collection. Later these sources will be validated so that they can provide answers to questions that have been formula E in the form of conclusions.

The Findings of this study are on accordance with the really that occurs by the two factions at the context of proposing the right of interpellation related to Formula E, the PDIP and PSI factions have performed their functions as representatives representing the aspirations and interests of the parties they represent. In this study the researchers saw that the intended struggle for interests did not merely represent the community, but also accommodated the interests of the party and also the commission within it. But in the case of Formula E, everything that is represented is interrelated and does not intersect. This also reflects the form of democracy that is developing in Indonesia.

Keywords: Representation, Interpellation Right, Formula E.